

Efektivitas Model Pendampingan BK3S dalam Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rodi Komba¹, Sebelom Kogoya^{2*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta

²Universitas Negeri Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Yogyakarta

Email: zebulonzeby16@gmail.com^{2*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model pendampingan yang dijalankan oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fenomena yang dikaji bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diperkuat triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian membuktikan bahwa BK3S DIY menerapkan model pendampingan multidimensional melalui empat tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, fasilitasi jaringan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Model ini terbukti efektif meningkatkan kapasitas manajerial, sumber daya manusia, kualitas program, dan jaringan kerja sama LKS, meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya dan sistem evaluasi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem evaluasi berbasis indikator terukur dan peningkatan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk keberlanjutan program pendampingan LKS di masa mendatang.

Keywords: BK3S, Efektivitas, Lembaga kesejahteraan sosial, Pendampingan, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial sebagai tujuan fundamental pembangunan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi negara semata. Partisipasi masyarakat yang terlembaga dan terorganisasi menjadi komponen yang tak tergantikan dalam ekosistem pelayanan sosial yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) hadir sebagai entitas yang mengisi ruang-ruang keterbatasan jangkauan program pemerintah, terutama dalam mendampingi kelompok rentan yang kerap luput dari radar intervensi kebijakan formal, (Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. 2012).

Secara normatif, keberadaan LKS mendapatkan pengakuan yuridis melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Adi, I. R. 2013). Lebih lanjut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial memberikan kerangka regulasi yang mengatur persyaratan, fungsi, dan mekanisme akreditasi LKS di seluruh Indonesia. Meski demikian, regulasi yang memadai tidak serta-merta diikuti oleh kondisi kelembagaan LKS yang optimal di lapangan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan tradisi

partisipasi sosial yang kuat dan jumlah LKS yang relatif banyak. Survei kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY pada tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 300 LKS aktif yang bergerak di berbagai bidang pelayanan, mulai dari penanganan anak terlantar, pendampingan penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial lansia, hingga pemberdayaan keluarga miskin. Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar LKS masih beroperasi dengan kapasitas yang terbatas, baik dari aspek manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan program yang terstruktur, maupun kemampuan mengakses jaringan kolaborasi yang lebih luas.

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) DIY hadir sebagai lembaga koordinasi yang mengemban fungsi strategis dalam menghubungkan, memperkuat, dan memberdayakan LKS-LKS yang berada di bawah koordinasinya. Berbeda dengan instansi pemerintah yang bersifat birokratis, BK3S beroperasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, sehingga mampu menjalin relasi yang lebih egaliter dengan LKS mitra (Ansell, C., & Gash, A. 2008). Meskipun demikian, efektivitas model pendampingan yang dijalankan BK3S DIY belum banyak dikaji secara akademis yang sistematis dan komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas kelembagaan LKS secara terukur.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi motivasi utama kajian ini terletak pada minimnya studi yang secara

husus menganalisis model pendampingan BK3S DIY secara holistik dengan mengintegrasikan analisis proses implementasi, pengukuran dampak terhadap kapasitas kelembagaan LKS, dan identifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitasnya. Berbeda dengan studi (Suharto 2015) dan (Sumpeno 2011) yang membahas pendampingan organisasi sosial secara umum tanpa menyasar lembaga koordinasi tertentu, dan berbeda pula dari kajian (Isbandi Rukminto Adi 2013) yang bersifat deskriptif pada level komunitas, penelitian ini secara khusus menempatkan BK3S DIY sebagai unit analisis tunggal serta memadukan perspektif teori pemberdayaan, efektivitas program, dan tata kelola jaringan secara terintegrasi suatu kombinasi analitis yang belum banyak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dirancang untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan studi kasus yang mendalam dan berbasis data lapangan yang kaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana model pendampingan dan pemberdayaan LKS yang diimplementasikan oleh BK3S DIY? (2) Sejauh mana efektivitas model tersebut dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan LKS? (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses pendampingan dan pemberdayaan LKS melalui BK3S? Secara ringkas, penelitian ini bertujuan menganalisis model, efektivitas, dan faktor penentu keberhasilan pendampingan BK3S DIY sebagai kontribusi teoretis bagi

pengembangan pendampingan sosial dan masukan praktis bagi BK3S DIY beserta pemangku kepentingan LKS di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018) untuk memahami secara mendalam implementasi model pendampingan BK3S DIY yang kompleks dan kontekstual. Desain ini memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan *bagaimana* dan *mengapa* melalui berbagai sumber data yang saling melengkapi (Creswell & Poth, 2018). Sebelum pengumpulan data, peneliti memperoleh izin dari BK3S DIY dan Dinas Sosial DIY serta persetujuan etik dari komisi etik institusi. Seluruh informan menandatangani *informed consent* yang menjamin kerahasiaan identitas dan hak untuk mengundurkan diri kapan saja.

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta dan delapan LKS binaan yang tersebar di empat kabupaten/kota Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul selama periode Januari hingga Maret 2024. Pemilihan lokasi dan LKS yang menjadi unit analisis dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam program pendampingan BK3S selama minimal dua tahun, keterwakilan bidang layanan (anak, lansia, disabilitas, kemiskinan), dan kesediaan berpartisipasi secara sukarela.

Informan penelitian berjumlah 12 orang yang dipilih dengan teknik purposive sampling, meliputi: (1) dua pengurus inti BK3S DIY (Sekretaris dan Koordinator Program); (2) dua pendamping lapangan

BK3S; (3) enam pengelola LKS binaan yang representatif dari berbagai latar belakang lembaga; serta (4) dua penerima manfaat layanan LKS. Jumlah informan ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kecukupan data (data sufficiency) dan titik jenuh informasi (information saturation), di mana penambahan informan tidak lagi menghasilkan tema baru yang bermakna. Karakteristik informan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kategori Informan	Usia (tahun)	Pengalaman/Lama Bergabung
Pengurus inti BK3S DIY (n=2)	45-58	8-15 tahun berkiprah di BK3S DIY
Pendamping lapangan BK3S (n=2)	29-41	3-7 tahun sebagai pendamping
Pengelola LKS binaan (n=6)	33-56	2-12 tahun mengelola LKS, seluruhnya minimal 2 tahun menerima pendampingan BK3S
Penerima manfaat layanan LKS (n=2)	24-47	1-3 tahun menerima layanan LKS binaan

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 45 hingga 90 menit per informan, menggunakan pedoman wawancara yang disusun melalui tiga tahap, yaitu kajian literatur untuk menurunkan indikator efektivitas pendampingan menjadi butir-butir pertanyaan, telaah oleh dua akademisi bidang kesejahteraan sosial untuk menguji validitas isi, dan uji coba (pilot interview) pada satu informan di luar sampel penelitian untuk menyempurnakan redaksi

dan urutan pertanyaan. Seluruh sesi wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis. Kedua, observasi partisipatif selama tiga bulan, difokuskan pada kegiatan pelatihan, kunjungan pendampingan lapangan, dan forum koordinasi yang diselenggarakan BK3S DIY untuk memperoleh pemahaman langsung tentang dinamika interaksi pendamping-LKS. Ketiga, analisis dokumen mencakup laporan tahunan BK3S DIY periode 2024-2025, dokumen program dan perencanaan LKS, notulen rapat koordinasi, serta foto-foto kegiatan pendampingan sebagai bukti visual implementasi program.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, (Huberman, dan Saldaña 2020), yang mencakup tiga komponen yang saling terhubung: reduksi data (pemilahan, pengkodean tematik, dan pengelompokan kategori analitik), penyajian data (narasi deskriptif, matriks tematik, dan tabel perbandingan), serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif dengan verifikasi berkelanjutan. Kredibilitas data dijaga melalui empat strategi. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif dari berbagai kategori informan. Kedua, triangulasi metode dengan mengonfirmasi temuan wawancara terhadap data observasi dan dokumen. Ketiga, member checking, yaitu mengembalikan ringkasan hasil wawancara kepada informan kunci untuk verifikasi keakuratan interpretasi. Keempat, peer debriefing, yaitu mendiskusikan proses dan temuan analisis secara berkala dengan

sejawat peneliti yang tidak terlibat langsung dalam penelitian untuk menguji konsistensi dan meminimalkan bias interpretatif, sebagaimana direkomendasikan oleh (Lincoln dan Guba 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pendampingan dan Pemberdayaan LKS oleh BK3S DIY

Temuan lapangan menunjukkan bahwa BK3S DIY telah mengembangkan dan menerapkan model pendampingan yang bersifat multidimensional, partisipatif, dan berbasis kebutuhan aktual LKS. Model ini merupakan hasil evolusi dari pengalaman praktis selama lebih dari dua dekade, yang terus disempurnakan berdasarkan umpan balik dari LKS mitra dan evaluasi program secara berkala. Berbeda dengan pendekatan pendampingan konvensional yang cenderung seragam dan bersifat atas-bawah, model BK3S DIY menempatkan LKS sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas dan potensi untuk berkembang, bukan sekadar objek intervensi (Healy, K. 2021). Model pendampingan BK3S DIY terdiri atas empat tahap yang saling berkaitan dan bersifat siklikal.

Tabel 2. Model Pendampingan Bk3s Diy

Tahap	Kegiatan Utama	Tujuan Spesifik
Identifikasi Kebutuhan	Pemetaan kapasitas awal melalui FGD, kunjungan lapangan, dan analisis dokumen lembaga	Memahami kondisi riil LKS (manajerial, SDM, program, administrasi) sebagai dasar perancangan program pendampingan yang kontekstual
Pelatihan & Pengembangan Kapasitas	Pelatihan manajemen organisasi,	Meningkatkan kompetensi teknis pengurus LKS;

	penyusunan proposal, pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas, pelaporan kegiatan, dan advokasi	menggunakan kombinasi metode kelas, studi kasus, dan pendampingan individual
Fasilitasi Jaringan Kerja Sama	Penghubungan LKS dengan pemerintah daerah, lembaga donor, perguruan tinggi, dunia usaha, dan LKS lain	Memperluas akses LKS terhadap pendanaan, dukungan teknis, peluang kolaborasi, dan sumber pengetahuan baru
Monitoring & Evaluasi Partisipatif	Kunjungan lapangan berkala, pertemuan evaluasi yang melibatkan LKS secara aktif, dokumentasi proses	Memastikan proses berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan perbaikan bersama secara adaptif

Keempat tahap tersebut tidak berjalan linier, melainkan bersifat siklikal dan saling menguatkan: hasil monitoring dan evaluasi pada satu siklus pendampingan menjadi masukan bagi identifikasi kebutuhan pada siklus berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas model BK3S DIY tidak semata terletak pada kelengkapan tahapannya, melainkan pada mekanisme umpan balik berkelanjutan yang menghubungkan keempat tahap tersebut secara adaptif.

Sekretaris BK3S DIY dalam wawancara mendalam menegaskan filosofi dasar model pendampingan ini melalui pernyataan berikut: "Kami tidak ingin LKS bergantung pada BK3S. Tugas kami adalah memperkuat mereka dari dalam, supaya suatu saat mereka bisa berjalan sendiri, bahkan menjadi mentor bagi LKS lain." Pernyataan ini mencerminkan orientasi pemberdayaan sejati (*genuine*

empowerment) yang melampaui sekadar transfer keterampilan teknis, melainkan menyentuh dimensi kepercayaan diri, kesadaran kritis, dan kemandirian organisasi LKS, (Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020).

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Healy 2021) yang merumuskan pendampingan sosial efektif sebagai proses fasilitasi yang mendorong refleksi kritis dan pengembangan potensi lembaga secara organik. Dalam konteks Indonesia, (Adi 2013) menekankan bahwa pendampingan yang berkualitas mensyaratkan pendamping yang tidak sekadar berperan sebagai instruktur, melainkan sebagai fasilitator dan mitra belajar yang menghormati konteks dan kapasitas lokal.

2. Perubahan Kapasitas Kelembagaan LKS Setelah Pendampingan

Analisis data lapangan, yang memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, mengungkapkan perubahan kapasitas yang signifikan pada LKS yang menerima pendampingan BK3S DIY secara reguler. Perubahan ini mencakup empat dimensi utama yang saling terkait: kapasitas manajerial, sumber daya manusia, kualitas program pelayanan, dan jaringan kerja sama.

Tabel 3. Perubahan Kapasitas Kelembagaan LKS Sebelum dan Sesudah Pendampingan BK3S DIY

Dimensi Kapasitas	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Manajerial	Perencanaan program reaktif dan insidental; tidak ada dokumen perencanaan tahunan; pelaporan tidak teratur dan tidak terstandarisasi	Perencanaan program tahunan terstruktur dengan indikator capaian; pelaporan sistematis, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik

Sumber Daya Manusia	Kompetensi terbatas pada bidang teknis sempit; pengurus paruh waktu dengan latar belakang pendidikan beragam; kepercayaan diri rendah dalam menghadapi lembaga eksternal	Peningkatan kompetensi manajemen organisasi dan teknis program; kepercayaan diri meningkat; kemampuan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal berkembang
Program Pelayanan	Bersifat konvensional dan responsif (bantuan material jangka pendek); tidak ada program pemberdayaan terencana; sasaran belum berbasis asesmen kebutuhan	Program inovatif dan holistik: pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikososial, advokasi hak; sasaran berbasis asesmen kebutuhan sistematis
Jaringan Kerja Sama	Bekerja secara terisolasi; akses pendanaan terbatas pada satu atau dua sumber; tidak ada peta pemangku kepentingan	Memiliki jaringan aktif dengan pemerintah daerah, donor internasional, perguruan tinggi, dunia usaha, dan LKS lain; diversifikasi sumber pendanaan

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perubahan paling menonjol terjadi pada dimensi manajerial dan sumber daya manusia, yaitu dimensi yang menjadi fokus utama tahap pelatihan dan pengembangan kapasitas pada model pendampingan BK3S DIY. Keterkaitan ini menunjukkan adanya kesesuaian (alignment) antara desain intervensi dan hasil yang dicapai: LKS yang menerima pelatihan manajemen organisasi dan pengelolaan keuangan secara intensif menunjukkan lompatan kapasitas manajerial yang lebih besar dibandingkan dimensi jaringan kerja sama, yang perkembangannya lebih bergantung pada faktor eksternal di luar kendali langsung BK3S DIY.

Pengelola salah satu LKS yang bergerak di bidang pendampingan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bantul menggambarkan perubahan yang ia rasakan secara personal: "Dulu, membuat proposal saja kami tidak berani. Setelah didampingi BK3S, sekarang kami sudah bisa menyusun sendiri, bahkan mengakses dana dari tiga sumber berbeda dalam satu tahun." Sebelum mendapatkan pendampingan BK3S, penyusunan proposal dan laporan kegiatan menjadi hambatan besar yang menghambat akses terhadap pendanaan eksternal; setelah mengikuti serangkaian pelatihan dan pendampingan individual dari BK3S, kemampuan tersebut berkembang pesat.

Perubahan kapasitas yang terdokumentasi ini konsisten dengan temuan (Narayan 2002) yang menegaskan bahwa pemberdayaan organisasi sosial mensyaratkan pengembangan kapasitas yang holistik tidak hanya menyentuh dimensi teknis-administratif, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kesadaran akan hak dan peran, serta kemampuan membangun relasi yang setara dengan pemangku kepentingan eksternal.

Perlu dicatat bahwa peningkatan kapasitas tidak berlangsung secara linier dan merata di antara seluruh LKS. Data lapangan mengidentifikasi adanya tiga kluster LKS berdasarkan profil perkembangan kapasitasnya: (1) LKS berkembang pesat, yakni LKS yang telah memiliki dasar kapasitas yang relatif baik sebelum pendampingan, dipimpin oleh pengurus berkomitmen tinggi, dan berhasil mengakses pendanaan eksternal secara mandiri dalam

kurun waktu dua tahun pendampingan; (2) LKS berkembang moderat, yakni LKS yang menunjukkan peningkatan kapasitas pada beberapa dimensi tertentu namun masih menghadapi hambatan signifikan pada dimensi lainnya; dan (3) LKS berkembang lambat, yakni LKS yang kapasitas awalnya sangat terbatas, menghadapi kendala SDM dan pendanaan yang berat, sehingga kemajuannya memerlukan waktu yang jauh lebih panjang dan pendampingan yang jauh lebih intensif.

Tipologi tiga kluster ini memiliki implikasi penting bagi desain program pendampingan ke depan. Pendekatan seragam (*one size fits all*) yang selama ini diterapkan BK3S DIY perlu dikembangkan menjadi pendekatan yang lebih adaptif dan terdiferensiasi di mana intensitas, metode, dan fokus pendampingan disesuaikan dengan profil kapasitas dan kebutuhan spesifik masing-masing (LKS. Wahab 2020) menunjukkan bahwa pendekatan diferensiasi dalam pendampingan organisasi sosial menghasilkan peningkatan kapasitas yang lebih efisien dan efektif dibandingkan pendekatan seragam, terutama dalam konteks di mana keragaman kapasitas awal lembaga sangat tinggi.

3. Dampak Terhadap Kualitas Pelayanan Sosial LKS

Peningkatan kapasitas kelembagaan yang dialami LKS secara konsisten berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan sosial yang mereka berikan kepada kelompok sasaran. Analisis data menunjukkan empat dimensi peningkatan kualitas layanan yang saling terkait.

Pertama, ketepatan sasaran meningkat secara signifikan. LKS yang mendapatkan pendampingan BK3S mampu melakukan asesmen kebutuhan yang lebih sistematis sebelum merancang program, sehingga intervensi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan aktual kelompok rentan yang mereka dampingi. Kedua, kualitas program mengalami peningkatan dari yang semula bersifat responsif dan material menuju program yang holistik, berbasis bukti, dan berorientasi keberlanjutan. LKS kini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga merancang program pemberdayaan yang membangun kemandirian penerima manfaat secara bertahap.

Ketiga, kontinuitas pelayanan menjadi lebih terjamin seiring meningkatnya kemampuan LKS dalam mengelola sumber pendanaan secara lebih sistematis dan terdiversifikasi. Keempat, kepuasan penerima manfaat meningkat. Salah seorang penerima manfaat layanan LKS di bidang rehabilitasi sosial lansia menyampaikan: "Sekarang petugasnya lebih sering datang, lebih sabar mendengarkan keluhan kami, dan tidak lagi memperlakukan kami hanya sebagai penerima bantuan." Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan LKS kini lebih humanis, lebih responsif terhadap kebutuhan individual, dan lebih menghargai keberadaan penerima manfaat sebagai subjek yang berdaya, bukan objek belas kasihan.

Temuan ini memperkuat argumen (Payne 2014) bahwa kapasitas kelembagaan organisasi sosial merupakan prediktor penting bagi kualitas layanan yang dihasilkan investasi pada pengembangan kapasitas

lembaga pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan nyata bagi kelompok sasaran.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pendampingan

Analisis mendalam terhadap variasi pengalaman LKS dalam menerima pendampingan BK3S DIY mengungkapkan bahwa efektivitas pendampingan tidak seragam di antara seluruh LKS yang terlibat. Variasi ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor-faktor internal LKS dan faktor-faktor eksternal yang melingkupi proses pendampingan. Tabel 3 menyajikan pemetaan komprehensif faktor-faktor tersebut.

Tabel 4. Pemetaan Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pendampingan BK3S DIY

Kategori Faktor	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Internal LKS	Komitmen dan motivasi tinggi pengurus; kapasitas awal yang memadai; budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan; kepemimpinan yang visioner	Keterbatasan SDM (relawan paruh waktu, turn over tinggi); pendanaan operasional tidak stabil; kapasitas awal yang sangat rendah; resistensi terhadap perubahan prosedur
Eksternal/ Pendamping	Profesionalisme dan pengalaman pendamping; pemahaman mendalam tentang konteks lokal; kemampuan fasilitasi dan komunikasi yang baik; ketersediaan pendamping yang cukup	Jumlah pendamping terbatas; rotasi pendamping yang sering mengganggu kontinuitas; beban kerja pendamping yang tinggi
Struktural/ Ekosistem	Dukungan pendanaan dari donor dan pemerintah; forum koordinasi sebagai wadah	Koordinasi dengan pemerintah daerah belum terintegrasi; sistem M&E

pembelajaran kolektif; jaringan kerja sama yang luas; kebijakan pemerintah yang kondusif	belum terstandarisasi; tumpang tindih program antar lembaga; keterbatasan anggaran BK3S
--	---

Pola pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa faktor pendukung dan penghambat cenderung berpasangan pada level yang sama: faktor internal LKS yang kuat (komitmen pengurus) berhadapan dengan faktor internal yang lemah (keterbatasan SDM), sementara faktor struktural yang mendukung (pendanaan donor) berhadapan dengan faktor struktural yang menghambat (koordinasi pemerintah daerah yang belum terintegrasi). Pola berpasangan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pendampingan sangat bergantung pada sejauh mana BK3S DIY mampu mengelola keseimbangan antara kedua sisi pada setiap level faktor, bukan sekadar memaksimalkan faktor pendukung semata. Di antara seluruh faktor yang teridentifikasi, komitmen pengurus LKS (faktor internal) dan kualitas profesional pendamping (faktor eksternal pendamping) muncul secara konsisten sebagai faktor yang paling menentukan keberhasilan pendampingan. Temuan ini sejalan dengan studi (Sumpeno 2011) yang menemukan bahwa kualitas relasi antara pendamping dan lembaga yang didampingi merupakan prediktor tunggal terkuat bagi keberhasilan intervensi pendampingan.

Faktor penghambat yang bersifat struktural khususnya belum optimalnya koordinasi antara BK3S DIY dengan pemerintah daerah dan belum terstandarisasinya sistem monitoring-evaluasi

merupakan tantangan yang memerlukan respons kebijakan yang lebih sistemik. Salah satu pendamping lapangan BK3S menyampaikan hal ini secara gamblang: "Kami sering kesulitan menyinkronkan jadwal dan data dengan Dinas Sosial, karena sistem pelaporan kami berbeda. Akibatnya, banyak informasi yang tumpang tindih atau malah tidak sampai." (Ansell dan Gash 2008) mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada kualitas mekanisme koordinasi yang dibangun meliputi kejelasan peran, regularitas komunikasi, dan komitmen bersama terhadap tujuan yang disepakati.

5. Diskusi: Efektivitas Model Pendampingan dalam Perspektif Teoretis

Mengacu pada kerangka teori pemberdayaan (Perkins dan Zimmerman 1995), model pendampingan BK3S DIY terbukti bekerja secara simultan pada ketiga dimensi pemberdayaan. Pada dimensi psikologis, pelatihan dan pendampingan individual yang diberikan BK3S berhasil membangun kepercayaan diri pengurus LKS dari yang semula merasa tidak mampu berhadapan dengan lembaga donor atau pemerintah, menjadi memiliki keyakinan untuk mengadvokasi kebutuhan lembaganya secara asertif. Pada dimensi sosial, forum koordinasi yang difasilitasi BK3S berhasil menciptakan jaringan solidaritas antar-LKS yang tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga membangun identitas kolektif sebagai komunitas pembelajaran. Pada dimensi struktural, peningkatan kemampuan administratif dan manajerial LKS membuka akses terhadap sumber daya yang sebelumnya tidak terjangkau. Efektivitas simultan pada

ketiga dimensi ini menjelaskan mengapa model BK3S DIY bekerja lebih baik dibandingkan model pendampingan konvensional yang umumnya hanya menysasar dimensi struktural (transfer sumber daya) tanpa menyentuh dimensi psikologis dan sosial: perubahan yang bertahan justru terjadi ketika pengurus LKS merasa dipercaya dan dilibatkan sebagai mitra setara, bukan sekadar penerima bantuan teknis.

Meskipun demikian, analisis kritis mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya mencapai tingkat kemandirian yang ideal. (Chambers 1995) mengingatkan bahwa pemberdayaan sejati merupakan perjalanan panjang yang tidak dapat dipercepat secara artifisial ia memerlukan waktu, pengalaman akumulatif, dan dukungan yang adaptif.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, LKS dengan kapasitas awal yang lebih tinggi menunjukkan kemajuan yang lebih pesat menuju kemandirian, sementara LKS dengan kapasitas awal terbatas masih memerlukan dukungan yang lebih intensif dan personal. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pendekatan diferensiasi (*differentiated approach*) dalam pendampingan sangat diperlukan.

Dari perspektif teori efektivitas program (Gibson, Ivancevich, dan Donnelly 2012), evaluasi terhadap model pendampingan BK3S DIY menghasilkan gambaran yang bernuansa. Pada indikator pencapaian tujuan dan peningkatan kapasitas organisasi, model ini menunjukkan hasil yang positif dan terukur. Namun, pada indikator keberlanjutan hasil yang merupakan dimensi efektivitas jangka panjang tantangan masih

signifikan. LKS yang berhasil mengakses pendanaan berkelanjutan pasca-pendampingan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas yang telah dibangun; sementara LKS yang gagal mengamankan pendanaan eksternal cenderung mengalami kemunduran bertahap.

Temuan ini memperkuat rekomendasi (Rossi, Lipsey, dan Henry 2019) bahwa desain program pendampingan yang efektif harus secara eksplisit memasukkan strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) sejak awal tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas jangka pendek, tetapi juga membantu LKS mengembangkan ekosistem pendukung yang memungkinkan mereka tetap beroperasi secara mandiri setelah pendampingan berakhir.

Dalam kerangka tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008), peran BK3S DIY sebagai lembaga koordinasi terbukti krusial dalam membangun sinergi antar-pemangku kepentingan. Forum koordinasi yang diselenggarakan secara reguler tidak hanya berfungsi sebagai ajang pertukaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolektif di mana LKS dapat belajar dari pengalaman satu sama lain. (Suharto 2015) menyebut fungsi ini sebagai peran katalisator lembaga koordinasi yang efektif tidak hanya menghubungkan, tetapi juga mendorong terjadinya sinergi yang menghasilkan nilai tambah yang tidak dapat diciptakan oleh masing-masing LKS secara individual.

Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah yang belum optimal menjadi lubang dalam ekosistem kolaboratif yang dibangun BK3S DIY. Perbedaan siklus perencanaan,

mekanisme kerja, dan budaya organisasi antara BK3S sebagai entitas masyarakat sipil dan birokrasi pemerintah daerah menciptakan friksi yang menghambat integrasi program secara penuh. Temuan ini konsisten dengan studi Klijn dan (Koppenjan 2016) tentang tantangan tata kelola jaringan (*network governance*), yang menekankan bahwa perbedaan rasionalitas institusional antar-aktor sering menjadi sumber utama inefisiensi dalam kemitraan lintas sektor.

Dibandingkan dengan temuan (Aantjes, Burrows, dan Armstrong 2022) yang menunjukkan bahwa proses pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil cenderung berhasil ketika bersifat relasional dan berjangka panjang, temuan penelitian ini memperkuat pola serupa pada konteks LKS di Indonesia, sekaligus menambahkan dimensi baru berupa peran forum koordinasi sebagai wahana pembelajaran kolektif yang jarang dibahas secara eksplisit pada literatur internasional. Sementara itu, (Kim dan Sullivan 2023) menemukan bahwa komposisi jaringan tata kelola kolaboratif memengaruhi kinerja layanan sosial secara berbeda-beda pada tiap dimensi sebuah pola yang juga tampak pada penelitian ini, di mana koordinasi BK3S-LKS berjalan efektif sementara koordinasi BK3S-pemerintah daerah masih lemah. Temuan ini juga sejalan dengan (Yuda, Pratiyudha, dan Kaffaa 2023) yang menekankan bahwa kapasitas adaptif kelembagaan menjadi kunci keberhasilan tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia, namun keberhasilan tersebut tetap bergantung pada integrasi antara aktor masyarakat sipil dan birokrasi pemerintah yang dalam kasus

BK3S DIY belum sepenuhnya tercapai. Secara teoretis, penelitian ini memperluas teori pemberdayaan tiga dimensi (Perkins dan Zimmerman 1995) dan konsep organizational empowerment (bandingkan Zanin, Hanna, dan Martinez 2022) dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan pada level kelembagaan LKS tidak hanya ditentukan oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh kualitas relasi tata kelola kolaboratif antara lembaga koordinasi, LKS, dan pemerintah daerah kontribusi yang memperkaya pemahaman tentang pemberdayaan organisasi pada konteks lembaga koordinasi kesejahteraan sosial di negara berkembang.

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini mengidentifikasi tiga area prioritas yang memerlukan perhatian segera dari BK3S DIY. Pertama, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstandarisasi menggunakan indikator yang valid, terukur, dan dirancang secara partisipatif bersama LKS untuk memungkinkan pengukuran dampak yang lebih objektif dan pembuatan keputusan berbasis bukti. Kedua, penerapan pendekatan diferensiasi dalam pendampingan di mana LKS dengan kapasitas awal terbatas mendapatkan intensitas pendampingan yang lebih tinggi dan lebih personal, sementara LKS yang lebih maju difasilitasi untuk berkontribusi sebagai mentor bagi LKS yang lebih muda. Ketiga, penguatan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mendorong integrasi program dan alokasi anggaran yang lebih memadai bagi penguatan LKS di DIY.

6. Implikasi Penelitian: Antara Teori dan Kebijakan

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial dan pembangunan sosial di Indonesia. Pertama, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pemberdayaan tiga dimensi (Perkins dan Zimmerman 1995) dalam konteks organisasi sosial lokal di Indonesia mengingat sebagian besar studi sebelumnya mengaplikasikan teori ini pada konteks komunitas atau individu, bukan pada entitas kelembagaan seperti LKS. Kedua, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor kontekstual yang memoderasi efektivitas pendampingan dalam setting budaya dan institusional Indonesia sebuah dimensi yang sering diabaikan oleh studi-studi yang mengimpor kerangka evaluatif dari konteks negara maju. Ketiga, penelitian ini mengusulkan pentingnya mengintegrasikan perspektif tata kelola kolaboratif dalam analisis efektivitas lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, yang selama ini lebih banyak dianalisis dari perspektif manajemen organisasi semata.

Secara praktikal, temuan penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi para pemangku kepentingan di ekosistem kesejahteraan sosial DIY. Bagi BK3S DIY, penelitian ini menyediakan peta diagnostik yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan model pendampingan yang saat ini diterapkan, sekaligus rekomendasi operasional yang dapat diimplementasikan secara bertahap. Bagi Dinas Sosial DIY dan pemerintah daerah, temuan ini memperkuat argumen untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai bagi penguatan BK3S

sebagai lembaga koordinasi strategis, dan untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi dengan LKS. Bagi LKS sendiri, penelitian ini memberikan cermin refleksi tentang dimensi kapasitas mana yang perlu diprioritaskan dalam agenda penguatan kelembagaan mereka.

Relevansi penelitian ini juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan kesepuluh tentang pengurangan kesenjangan dan tujuan ketujuh belas tentang kemitraan untuk tujuan yang lebih besar. Penguatan LKS melalui model pendampingan BK3S DIY merupakan kontribusi nyata pada agenda SDGs di tingkat lokal dengan memperkuat kapasitas agen perubahan sosial di tingkat akar rumput yang secara langsung bersentuhan dengan kelompok paling rentan. Dalam konteks ini, kajian akademis yang mendokumentasikan dan mengevaluasi model-model pendampingan yang efektif menjadi kontribusi strategis bagi pengembangan praktik terbaik di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelitian lanjutan yang menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan sampel yang lebih representatif dan rentang waktu pengamatan yang lebih panjang sangat diperlukan untuk memperkuat dasar bukti bagi pengembangan kebijakan pendampingan LKS yang lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menafsirkan temuannya. Pertama, desain studi kasus tunggal pada satu lembaga

koordinasi (BK3S DIY) membatasi generalisabilitas temuan pada konteks BK3S di provinsi lain atau lembaga koordinasi kesejahteraan sosial dengan karakteristik berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas (12 orang) dan periode observasi yang relatif singkat (tiga bulan) belum memungkinkan penelusuran dampak jangka panjang dan keberlanjutan hasil pendampingan secara menyeluruh. Ketiga, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-interpretatif sehingga tidak mengukur besaran efektivitas secara kuantitatif terstandarisasi. Keterbatasan ini menjadi dasar penting bagi penelitian lanjutan yang direkomendasikan pada bagian berikut.

Berdasarkan temuan, kesimpulan, dan keterbatasan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada BK3S DIY untuk: (1) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator terukur yang dirancang secara partisipatif; (2) menerapkan strategi diferensiasi pendampingan berdasarkan profil kapasitas awal LKS; (3) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan terformalisasi; (4) mengembangkan program advokasi kebijakan untuk mendorong alokasi anggaran pemerintah daerah bagi penguatan LKS; dan (5) meningkatkan kapasitas dan jumlah pendamping lapangan untuk memperluas jangkauan pendampingan secara lebih merata. Penelitian lanjutan dengan pendekatan *mixed-methods* yang melibatkan sampel LKS yang lebih luas dan indikator kuantitatif yang terstandarisasi sangat direkomendasikan

untuk memperkuat generalisabilitas temuan penelitian ini.

Sebagai penutup, penelitian ini mengafirmasi bahwa keberhasilan BK3S DIY dalam mendampingi dan memberdayakan LKS merupakan cerminan komitmen kolektif masyarakat DIY dalam merawat ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif. Pendampingan yang efektif bukan semata tentang transfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan tentang membangun kepercayaan, menghargai keunikan konteks lokal, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap lembaga sekecil apa pun memiliki kapasitas untuk bertumbuh dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Model pendampingan: BK3S DIY telah mengembangkan dan mengimplementasikan model pendampingan yang bersifat multidimensional, partisipatif, dan berbasis kebutuhan, mencakup empat tahap yang saling berkaitan identifikasi kebutuhan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, fasilitasi jaringan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi partisipatif yang secara konsisten menempatkan LKS sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek intervensi.

Efektivitas peningkatan kapasitas: model ini terbukti efektif meningkatkan kapasitas kelembagaan LKS pada empat dimensi manajerial, sumber daya manusia, kualitas program pelayanan, dan jaringan

kerja sama sehingga berdampak positif pada ketepatan sasaran, kualitas program, kontinuitas layanan, dan kepuasan penerima manfaat. Meskipun demikian, efektivitas ini belum merata di antara seluruh LKS, dan keberlanjutan hasil pendampingan masih memerlukan perhatian sistemis.

Faktor penentu: efektivitas pendampingan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal LKS (komitmen pengurus, kapasitas awal), faktor eksternal pendamping (profesionalisme, jumlah pendamping), dan faktor struktural ekosistem (pendanaan, koordinasi lintas sektor). Komitmen pengurus LKS dan profesionalisme pendamping muncul sebagai faktor paling menentukan, sementara koordinasi dengan pemerintah daerah yang belum terintegrasi menjadi hambatan struktural utama yang memerlukan pendekatan diferensiasi dalam desain program pendampingan ke depan.

Kontribusi penelitian: temuan ini memperkaya pemahaman tentang pemberdayaan organisasi pada konteks lembaga koordinasi kesejahteraan sosial dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan LKS ditentukan oleh interaksi antara kapasitas internal organisasi dan kualitas tata kelola kolaboratif, sekaligus memberikan peta diagnostik praktis bagi BK3S DIY dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem kesejahteraan sosial di Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta atas keterbukaan dan

kerja sama yang penuh selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi yang tulus juga disampaikan kepada seluruh pengurus dan pengelola LKS yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman sebagai informan penelitian. Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan akademis yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Gadjah Mada. Terakhir, peneliti berterima kasih kepada para reviewer anonim yang memberikan masukan konstruktif yang memperkaya kualitas naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aantjes, C. J., Burrows, D., & Armstrong, R. (2022). Capacity development in pursuit of social change: An examination of processes and outcomes. *Development in Practice*, 32(4), 536–550. <https://doi.org/10.1080/09614524.2021.1937547>
- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Pers.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Healy, K. (2021). *Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Kemensos RI.
- Kim, S., & Sullivan, A. A. (2023). Connecting the composition of collaborative governance structure to community-level performance in homeless services. *Public Administration Review*, 83(4), 734–749. <https://doi.org/10.1111/puar.13632>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks in the Public Sector*. Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. The World Bank.
- Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment Theory, Research, and Application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A Systematic Approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Spicker, P. (2020). *Social Policy: Theory and Practice* (4th ed.). Policy Press.
- Suharto, E. (2015). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Edisi Keempat). Alfabeta.

- Sumpeno, W. (2011). *Menjadi Fasilitator Genius: Kiat-Kiat dalam Mendampingi Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Wahab, A. A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 112–124.
- Yayasan BK3S DIY. (2023). *Laporan Tahunan Program Pendampingan dan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2022*. BK3S DIY.
- Yuda, T. K., Pratiyudha, P. P., & Kafaa, K. A. (2023). Managing social policy in the emerging welfare regime of governance: What Indonesia can learn from South Korea's experience. *International Social Work*, 66(2), 357–372. <https://doi.org/10.1177/00208728211011634>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zanin, A. C., Hanna, K. N., & Martinez, L. V. (2022). Mirroring empowerment: Exploring structural barriers to volunteer motivation fulfillment in an all-female youth sport program. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 51(5), 1158–1183. <https://doi.org/10.1177/08997640211034585>
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2019). *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (11th ed.). Cengage Learning.